KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Panggil BIN, BSSN,dan Kapolri Hari Ini
Tanggal : Kamis, 12 November 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

SKANDAL PENYADAPAN PRESIDEN

DPR Panggil BIN, BSSN, dan Kapolri Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS — Menyusul terungkapnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sederet tokoh lainnya, Komisi I DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Badan Intelijen Negara dan Badan Siber dan Sandi Negara, Kamis (12/11/2026). Secara terpisah, Komisi III DPR juga menggelar rapat kerja dengan Kapolri.

DPR menilai peristiwa ini bukan sekadar tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara semata, melainkan alarm darurat atas rapuhnya sistem kontra-intelijen di lingkar paling strategis Indonesia tersebut.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menilai, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem intelijen dan keamanan siber nasional secara menyeluruh. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus menutup celah yang memungkinkan penyadapan terjadi.

"Komunikasi kepala negara adalah salah satu rahasia paling strategis yang dimiliki sebuah bangsa. Kalau komunikasi presiden bisa disadap dari dalam institusi negara selama lebih dari setahun tanpa terdeteksi, berarti ada yang harus kita benahi bersama dalam sistem kontra-intelijen kita," ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11).

Diketahui, Badan Reserse Kriminal Polri tengah mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh. Dalam kasus ini, empat perwira tinggi polisi sebagai tersangka. Mereka meliputi bekas Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Perwira Tinggi Bareskrim Polri Irjen Slamet Uliandi.

Pada Selasa (10/11), Ahrie menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri. Mantan ajudan Presiden Prabowo ini menjadi orang pertama dari tersangka penyadapan yang menjalani sidang. Sidang etik menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Ahrie menyatakan banding.

Lebih lanjut, Oleh Soleh mengingatkan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara (BIN) memegang mandat sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara. Karena itu, fungsi deteksi dini terhadap ancaman, termasuk ancaman yang datang dari dalam, perlu dievaluasi secara serius tanpa harus saling menyalahkan.

"Ini bukan soal mencari kambing hitam, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kami mendukung langkah Presiden yang telah meminta laporan dari Kepala BIN. Kami juga berharap BIN menjalankan fungsi kontra-intelijen untuk menelusuri ke mana saja hasil sadapan itu mengalir," katanya.

Komisi I DPR juga meminta dilakukan audit tertutup terhadap seluruh jalur komunikasi presiden dan pejabat strategis negara dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), BIN, dan Sekretariat Presiden. Audit meliputi perangkat, akun, jaringan, hingga hak akses, serta disertai pengamanan ketat barang bukti elektronik.

Apalagi kasus penyadapan ini juga datang bersamaan dengan lonjakan aktivitas serangan siber yang menyasar Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan nasional kini datang dari dua arah sekaligus, yakni dari dalam sistem dan dari luar negeri.

Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita.

Habiburokhman

"Ancaman dari dalam dan dari luar sama berbahayanya. Karena itu, penguatan intelijen dan keamanan siber tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. BIN, BSSN, Baais TNI, Polri, dan Kemenkomdigi harus terhubung dalam satu sistem koordinasi yang jelas dengan pembagian kewenangan yang tegas agar tidak tumpang tindih," papar Oleh.

Komisi I DPR juga berkomitmen mendukung penguatan anggaran, teknologi, dan sumber daya manusia di bidang intelijen dan siber, selama disertai akuntabilitas dan pengawasan yang ketat.

"Kami tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah. Apa pun motif di balik penyadapan ini, semuanya harus diungkap secara tuntas dan transparan sesuai hukum. Negara harus memastikan bahwa instrumen yang seharusnya melindungi presiden dan rakyat tidak pernah lagi berubah menjadi ancaman," tegas Oleh.

Pembenahan Polri

Sementara itu, Komisi III DPR juga akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, hari ini. Rapat digelar untuk membahas perkembangan penanganan kasus tersebut secara komprehensif, mulai dari pengungkapan aktor intelektualis, motif, hingga pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, rapat kerja tersebut merupakan wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR agar penegakan hukum berjalan transparan dan tidak berhenti sekadar penetapan tersangka.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi III DPR berharap dapat memperoleh penjelasan menyeluruh dari Kapolri mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, hingga mekanisme penggunaan sistem penyadapan. Langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan serupa di kemudian hari sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak privasi setiap warga negara.

"Komisi III DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR akan mengawal penanganan perkara ini sampai seluruh fakta terungkap sejelas-jelasnya. "Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ucapnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap tim khusus Polri yang dipimpin Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Asep Safrudin mampu membongkar tuntas dalang di balik operasi ini. DPR juga mendorong sinergi antara Polri dan BIN untuk mengusut perkara secara serius dan transparan.

Terkait sanksi pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada tersangka penyadapan, Ahrie Sonta, Habiburokhman menilai, hal itu sudah tepat, adil, dan terukur. Sanksi sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat. Apalagi tindakan penyelewengan itu juga sudah jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

"Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita," kata politisi Partai Gerindra ini.

"Ketika instrumen intelijen dan kewenangan strategis yang seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara justru disalahgunakan secara serampangan, dampaknya bukan hanya meruntuhkan kredibilitas institusi, melainkan juga mengancam rasa aman publik serta tatanan hukum secara mendasar," imbuhnya.

Ia menekankan bahwa komitmen *zero tolerance* (tanpa toleransi) harus diterapkan tanpa pandang bulu terhadap seluruh pihak yang terbukti terlibat. Selain itu, mereka yang terbukti bersalah juga harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

"Komisi III DPR akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga," ujar Habiburokhman.

(DVT/SYA)